

MANAJEMEN KOORDINATOR GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH ALIYAH NEGERI

Ira Wirtati^{1*}, Yenti Arsini²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author e-mail: irawirtati@uinsu.ac.id, yentiarsini@uinsu.ac.id

Article History

Received: May

Revised: June

Published: June

Key Words:

Teacher Guidance and
counseling, Planning,
Organizing,
Implementing BK

Abstract: *The Guidance and Counseling Coordinator certainly has the authority to plan, organize and implement guidance and counseling. One very important element to consider is how counseling guidance is carried out in schools. The purpose of this study is to find out how the management of guidance and counseling in Madrasah Aliyah Negeri schools. This study used a descriptive qualitative approach, the data collection method used was documentation, observation, and interviews with one BK coordinator and five BK teachers. Research findings show that there are still obstacles faced by BK coordinators in the preparation of BK programs, BK organizing and implementing BK including the lack of BK teacher personnel and there are still BK teachers who do not have BK education backgrounds, as well as inadequate BK facilities and infrastructure, so that the implementation of BK services cannot be implemented optimally.*

Kata Kunci:

Guru Bimbingan dan
konseling,
Perencanaan,
Pengorganisasian,
Pelaksanaan BK

Abstrack: Koordinator Bimbingan dan Konseling tentunya memiliki wewenang untuk membuat perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Salah satu elemen yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bagaimana bimbingan konseling dijalankan di sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen bimbingan dan konseling yang ada di sekolah Madrasah Aliyah Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara kepada satu orang koordinator BK dan lima orang guru BK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada kendala yang dihadapi oleh koordinator BK dalam penyusunan program BK, pengorganisasian BK dan pelaksanaan BK diantaranya adalah kurangnya personil guru BK dan masih ada guru BK yang tidak berlatar belakang Pendidikan BK, serta sarana dan prasarana BK yang belum memadai, sehingga pelaksanaan layanan BK belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pendahuluan

Keberhasilan Pendidikan juga sangat ditentukan oleh seberapa besar kegiatan layanan bimbingan konseling diberikan kepada siswa. Bimbingan dan Konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli yang dilakukan oleh profesional yaitu konselor. Sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 1990 Bab X Pasal 27 menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan merencanakan masa depan.

Jones (1970: 7) mengemukakan berikut ini. Guidance is the help given by one person to another in making choice and adjustment and in solving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow in his independence and ability to be responsible for himself. Jones



menegaskan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain dalam memantapkan pilihan dan dalam memecahkan masalah. Bimbingan diberikan agar orang dapat lebih mandiri. Muro & Dinkmeyer (1977: 15) mengatakan bahwa “counseling is a personal relationship between a professionally trained counselor and a child which assists the child to communicate and meet immediate and future needs”. Menurut Hackney & Nye (1973: 5) pengertian konseling adalah “Counseling is the helping relationship, which includes (1) someone seeking help, (2) someone willing to give help, who is (3) capable of, or trained to, help (4) in a setting which permits that help to be given and received”.

Paparan di atas menguraikan makna dari bimbingan dan konseling secara terpisah. Namun kedua istilah tersebut menjadi satu kesatuan dan saling bergantung dalam pelaksanaannya. Seperti tertuang dalam SK Mendikbud Nomor 025/ O/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya mengatakan bahwa: Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan

berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar berkembang optimal sesuai tugas perkembangannya. Sukmadinata (2007: 74) mengatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling berikut ini. Bantuan mengoptimalkan perkembangan individu (peserta didik) adalah membantu meningkatkan potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam mencari, memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan. Selanjutnya Depdiknas (2008:194) mengatakan bahwa: dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik (konseli), agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral-spiritual.

Untuk mewujudkan harapan di atas, guru BK hendaknya melaksanakan kegiatan manajemen dalam aktivitas kegiatannya. Manajemen Bimbingan dan Konseling merupakan aktivitas terencana, terorganisir, terlaksana dan terawasi yang dilaksanakan guru BK guna mencapai tujuan program dan layanan BK.

Perencanaan program bimbingan dan konseling harus dipersiapkan dengan baik karena kegiatan ini bertujuan untuk menentukan program yang akan dilakukan. Sukardi & Kusmawati (2008: 37) mengatakan bahwa: Studi kelayakan adalah seperangkat kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Penyusunan program bimbingan dan konseling harus berdasarkan kebutuhan. Seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2007: 124) berikut ini. Penyusunan program bimbingan dan konseling perlu didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan nyata di lapangan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diadakan pengumpulan data, baik data primer yang diperoleh langsung dari siswa, orang tua dan guru, maupun data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di sekolah.

Sementara itu, Depdiknas (2008: 220) menjelaskan bahwa: Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dari kegiatan asesmen, atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Kegiatan asesmen meliputi (1) asesmen lingkungan, yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasana

pendukung program bimbingan dan konseling, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah; dan (2) asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik, yang menyangkut karakteristik peserta didik, seperti aspek-aspek fisik (kesehatan dan keberfungsian), kecerdasan, motif belajar, sikap dan kebiasaan belajar, minat-minatnya (pekerjaan, jurusan, olahraga, seni dan keagamaan), masalah-masalah yang dialami, dan kepribadian atau tugas-tugas perkembangan, sebagai landasan untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Gysbers & Henderson (2012: 206) mengatakan bahwa: penilaian kebutuhan tersebut diperoleh dari siswa, pendidik, orang tua, anggota komunitas, pengusaha, dan lulusan.

Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling merupakan penempatan personel bimbingan dan konseling yang tepat dalam organisasi serta pembagian tugas yang tepat. Dalam SK Menpan No. 84/1993 (Prayitno, 2001: 6) ditegaskan bahwa tugas pokok guru bimbingan dan konseling adalah: Menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, Depdiknas (2008: 233) yang menyatakan bahwa personel utama pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah: Konselor dan staf administrasi bimbingan dan konseling. Sementara personel pendukung pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf administrasi) di dalam organisasi pelayanan bimbingan dan konseling, dengan koordinator dan guru pembimbing/konselor serta staf administrasi bimbingan dan konseling sebagai pelaksana utamanya.

Pelaksanaan bimbingan dan konseling merupakan hal yang sangat penting. Maka, program harus dilakukan seutuhnya sesuai dengan SKB Mendikbud Nomor 0433/P/1993 (Prayitno, 2001: 8) menyebutkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah melaksanakan fungsi pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier.

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling konselor sebagai personel utama mempunyai beban mengajar. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Peserta didik yang berada dalam tanggung jawab guru pembimbing disebut siswa asuh bagi guru pembimbing yang bersangkutan.

Selanjutnya, tugas pokok guru pembimbing perlu dijabarkan ke dalam program-program kegiatan. Nurihsan & Sudianto (2005: 34) mengatakan program yang telah direncanakan dilaksanakan melalui kegiatan berikut ini. Persiapan pelaksanaan: (a) persiapan fisik (tempat dan perabot), perangkat keras, (b) persiapan bahan, perangkat lunak, (c) persiapan personel, (d) persiapan keterampilan menerapkan/menggunakan metode, teknik khusus, media dan alat, (e) persiapan administrasi. Pelaksanaan kegiatan: (a) penerapan metode, teknik khusus, media dan alat, (b) penyampaian bahan, pemanfaatan sumber alam, (c) pengkajian nara-sumber, (d) efisiensi waktu, (e) administrasi pelaksanaan.

Adapun strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan menurut Depdiknas (2008: 224), dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Pelayanan dasar meliputi: bimbingan klasikal, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data (aplikasi instrumen). Pelayanan responsif meliputi:

konseling individual dan kelompok, referral (rujukan atau alih tangan), kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, konsultasi, bimbingan teman sebaya (peer guidance/peer facilitation), konferensi kasus, kunjungan rumah. Perencanaan individual, dalam layanan ini konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier.

Dukungan sistem. Pengembangan profesi. Konselor secara terus menerus berusaha untuk meng-update pengetahuan dan keterampilannya melalui (1) in-service training, (2) aktif dalam organisasi profesi, (3) aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti seminar dan workshop (lokakarya), atau (4) melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi (Pascasarjana). Pengawasan merupakan intervensi senior kepada junior, seperti dikemukakan oleh Bernard and Goodyear (Katrina, 2008:12) "definition of supervision to an intervention provided by a more senior member of a profession to a more junior member or members of that same profession". Selanjutnya, SK Mendikbud Nomor 020/U/1998 dalam Prayitno (2001: 18) mengatakan bahwa: Pengawas sekolah bimbingan dan konseling adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling.

Bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan yang membantu peserta didik. Seperti dikemukakan Mortensen & Schmuller dalam Ali, dkk. (2007: 174) bahwa: Guidance may be defined as that part of the total educational program that helps provide the personal opportunities and specialized staff services by which each individual can develop to the fullest of his abilities and capacities in terms of the democratic idea (Bimbingan dapat didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan program pendidikan yang membantu memberikan kesempatan pribadi dan layanan staf khusus yang melaluinya setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya secara maksimal sesuai dengan gagasan demokrasi).

Peserta didik sebagai warga sekolah membutuhkan bantuan karena berada dalam tahap perkembangan, dimana peserta didik mengalami kesulitan dan hambatan akibat dari kurangnya pemahaman terhadap diri sendiri dan juga lingkungannya. Oleh karena itu, dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Seperti model bimbingan dan konseling perkembangan. Mattewson, dalam Yusuf & Nurihsan (2005: 53) mengatakan bahwa bimbingan dan konseling perkembangan merupakan pandangan mutakhir yang bertitik tolak dari asumsi positif tentang potensi manusia. Siswa sebagai elemen utama sekolah merupakan individu yang sedang berkembang sehingga rentan mengalami masalah yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh sebab itu, kehadiran layanan bimbingan dan konseling di sekolah khususnya menjadi sangat diperlukan namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa bimbingan dan konseling sangat diperlukan terutama di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Manajemen Koordinator Guru Bimbingan Konseling di salah satu Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan. Pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Perencana Bimbingan dan Konseling di salah satu MAN di Kota Medan.

2. Bagaimana Manajemen Organisasi Bimbingan dan Konseling di salah satu MAN di Kota Medan.
3. Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling disalah satu MAN di Kota Medan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (yin 2014) untuk mengetahui bagaimana manajemen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliah Negeri. Creswell (2016) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Enam orang yang berpartisipasi secara sukarela berasal dari sat orang coordinator guru bimbingan dan konseling dan 5 orang guru bimbingan dan konseling. Metode ini melibatkan melakukan penelitian dalam kondisi yang alami, membuat gambaran yang rumit, memeriksa kosa kata, dan membuat laporan komprehensif tentang perspektif responden.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Peneliti kualitatif dapat menggunakan berbagai jenis data penting, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan informasi audio visual (Creswell, 2016). Metode observasi partisipan melibatkan peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati perilaku dan tindakan individu (Sudaryono, 2023). Metode tambahan yang digunakan adalah wawancara mendalam. menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan data. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui manajemen perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliah Negeri serta peran dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan konseling. Setiap wawancara berlangsung selama 45 menit. Setelah rekaman suara dan persetujuan peserta disimpan, wawancara ditranskripsikan kata demi kata untuk dianalisis. data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles & Huberman yang menekankan pada tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan selama proses penelitian, yaitu : (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Manajemen Perencana Bimbingan dan Konseling

Perencanaan bimbingan dan konseling juga kontekstual, artinya program kerja disusun sesuai dengan visi dan misi sekolah serta terpadu dengan program kegiatan sekolah. Perencanaan bimbingan dan konseling belum faktual karena belum melakukan assesmen lingkungan. Kondisi ini belum sesuai dengan yang dirumuskan Depdiknas (2008: 220) yaitu ada dua asesmen yang harus dilakukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan bimbingan dan konseling yaitu assesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan atau masalah peserta didik. Menyusun program bimbingan dan konseling dimulai assesmenlingkungan yang terkait dengan kegiatan mengidentifikasi harapan sekolah dan masyarakat (orang tua peserta didik), sarana dan prasarana pendukung program bimbingan, kondisi dan kualifikasi konselor, dan kebijakan pimpinan sekolah. Pendapat senada dengan Gysbers & Henderson, (2012: 206) mengatakan penilaian kebutuhan diperoleh dari siswa, pendidik, orang tua, anggota komunitas, pengusaha, dan lulusan.

Proses penyusunan perencanaan bimbingan dan konseling dimulai dari studi kelayakan. Studi kelayakan ialah proses mempelajari kelayakan rencana program bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan waktu yang tersedia. Mempertimbangkan waktu belajar efektif karena harus menyesuaikan dengan program sekolah secara keseluruhan. Disamping itu, alokasi waktu kegiatan kontak langsung yang dilakukan secara klasikal satu jam pelajaran per kelas per minggu. Hal ini belum sesuai dengan dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 223) yaitu kegiatan kontak langsung secara klasikal dua jam pelajaran per kelas per minggu. Disamping itu, memperhatikan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Ketersediaan anggaran harus diperhatikan dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Anggaran khusus untuk program bimbingan dan konseling belum ada tetapi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program bergabung dengan kesiswaan, kurikulum, kerumahtanggaan, humas, dan sarana & prasarana yang diperoleh dari RAPBS dan komite.

Rencana program tertuang dalam program tahunan dan semester kemudian dijabarkan lebih detail pada satuan layanan. Pada satuan layanan tercantum jenis layanan, metode layanan, materi layanan, dan lain. Perencanaan ketenagaan, sudah melakukan pembagian siswa asuh berdasarkan kelas dengan mempertimbangkan jumlah siswa yang ada per kelas. Program bimbingan dan konseling dikelola oleh 6(enam) orang guru bimbingan dan konseling, 4 (empat) orang guru bimbingan dan konseling memiliki latar belakang guru bimbingan dan konseling, sementara 2 (dua) orang lagi guru mata pelajaran yang diperbantukan ke guru Bimbingan dan Konseling dengan latar belakang Pendidikan Bahasa Inggris dan biologi. Kondisi ini mempengaruhi kinerja personil bimbingan dan konseling menjadi kurang efektif. Hal ini tidak sesuai dengan asas bimbingan dan konseling,

Depdiknas (2008: 206) mengemukakan tentang asas keahlian yaitu yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas kaidah-kaidah profesional. Selain itu, rasio antara peserta didik belum seimbang, 1910 jumlah peserta didik hanya diampu oleh 6 guru bimbingan dan konseling. Selain itu, tidak sesuai dengan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mengatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Selanjutnya, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa beban mengajar gurubimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Perencanaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Sarana dan prasarana belum memadai. Ruang bimbingan dan konseling berukuran 6 x 6 meter yang terdiri dari: ruang kerja guru bimbingan dan konseling, ruang bimbingan kelompok, ruang konseling individual, dan ruang tamu bimbingan dan konseling. Seluruh ruangan menyatu dan hanya dibatasi kayu untuk memisahkan setiap ruangan, sehingga jika dilakukan konseling individual di ruangan konseling individual atau pun di ruang konseling kelompok akan terdengar ke seluruh ruangan bimbingan dan konseling. Hal ini tidak sesuai dengan asas bimbingan dan konseling Depdiknas (2008: 204) asas kerahasiaan adalah

asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Di samping itu, ketentuan ruang bimbingan dan konseling yang sesuai dengan Depdiknas (2008: 238) terdiri dari ruang tamu, ruang administrasi, ruang konseling individual, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang biblioterapi, ruang relaksasi/desentralisasi, dan ruang tamu.

Ruang bimbingan dan konseling salah satu MAN di kota Medan belum memenuhi syarat standar yang ditentukan. Meski kondisi ruang konseling yang kurang memadai bukan menjadi hambatan guru bimbingan dan konseling melakukan konseling karena layanan konseling bisa dilakukan di ruangan lain seperti ruang perpustakaan, dan ruangan lainnya yang tidak dipakai. Selain itu, guru bimbingan dan konseling melakukan konseling di luar jadwal jam pelajaran di sekolah. Selain itu, disiasati dengan memilih waktu yang tepat seperti pagi hari atau sore hari di ruang bimbingan dan konseling. Di samping itu, ruang bimbingan kelompok sehari-hari digunakan untuk ibadah/sholat para guru padahal ada masjid sekolah yang bisa digunakan untuk ibadah. Ruangan bimbingan kelompok dialih fungsikan akibatnya ruangan tersebut belum dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan bimbingan dan konseling di salah satu MAN di kota Medan yang belum sesuai dengan kaidah antara lain belum melakukan asesmen lingkungan, alokasi waktu kontak langsung secara klasikal hanya satu jam pelajaran per kelas per minggu, personil bimbingan dan konseling masih ada yang berlatar belakang pendidikan nonbimbingan dan konseling, perencanaan prasarana belum memadai. Needs assessment sangatlah penting karena dengan dilakukannya analisis kebutuhan maka akan diketahui kebutuhan-kebutuhan yang akan dituangkan dalam program. Sementara, perencanaan yang sudah sesuai dengan kaidah antara lain sudah melakukan asesmen kebutuhan siswa, program disesuaikan dengan visi dan misi sekolah, sudah mencantumkan program yang akan dilakukan, dan terdapat sumber daya yaitu personil bimbingan dan konseling dan sumber dana.

Proses penyusunan bimbingan dan konseling dilakukan di awal tahun. Rencana bimbingan dan konseling disusun oleh guru bimbingan dan konseling lalu diserahkan ke kepala sekolah untuk mendapat persetujuan. Rencana program yang membutuhkan anggaran, seperti mengundang psikolog untuk melakukan tes psikologi dan program lainnya disisipkan di kesiswaan. Untuk mengetahui kebutuhan siswa dilakukan analisis kebutuhan siswa menggunakan alat DCM. Pembagian siswa asuh sesuai dengan kriteria yang berlaku yaitu minimal mengampu 150 siswa asuh dan seluruh siswa yang ada dibagi oleh 6 guru bimbingan dan konseling.

Menyusun program bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan anggaran melibatkan semua wakil kepala sekolah. Idealnya, menyusun program bimbingan dan konseling melibatkan stakeholder sekolah untuk merumuskan program bimbingan dan konseling namun yang dilakukan hanya kolaborasi secara informal dan parsial. Hal ini belum sesuai dengan yang dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 220) mengatakan bahwa penyusunan program bimbingan dan konseling dimulai dengan kegiatan asesmen yaitu asesmen lingkungan dan asesmen kebutuhan siswa. Selanjutnya, belum sesuai juga dengan Sukmadinata (2007: 124) mengatakan bahwa menyusun program bimbingan dan konseling didasarkan atas

kebutuhan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diadakan pengumpulan data, baik data primer yang diperoleh langsung dari siswa, orang tua dan guru, maupun datasekunder dari dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan program bimbingan dan konseling belum sesuai dengan ketentuan yang ada

B. Manajemen Pengorganisasian Bimbingan dan Konseling

Kegiatan dalam pengorganisasian yaitu koordinasi menangani kasus-kasus yang dihadapi peserta didik baik di dalam dan di luar sekolah oleh personil bimbingan dan konseling. Mekanisme pembagian tugas guru bimbingan dan konseling dalam membimbing siswa minimal mengampu 150 siswa. Siswa berjumlah 1910 orang yang diampu oleh enam guru bimbingan dan konseling berdasarkan kelas dengan mempertimbangkan jumlah siswa per kelas karena setiap kelas jumlahnya berbeda.

Deskripsi tugas personil bimbingan dan konseling yaitu mengampu siswa asuh yang dibagi berdasarkan kelas berikut ini. Koordinator bimbingan dan konseling mengampu hampir 500 orang siswa, sisanya 1.410 siswa lainnya diampu oleh lima orang guru bimbingan dan konseling. Terdapat kelebihan siswa yang hampir dua kali lipat dari jumlah minimal siswa yang seharusnya diampu oleh seorang guru bimbingan dan konseling. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Pasal 1 ayat 6 yang mengatak- kan bahwa beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Untuk mengantisipasi kondisi ini sesuai dengan rasio personil bimbingan dan konseling dan jumlah siswa sudah selayaknya menambah seorang personil bimbingan dan konseling. Di samping itu, personil bimbingan dan konseling masih memiliki tugas lain di luar guru bimbingan dan konseling. Berikut tugas-tugas yang diemban oleh personil bimbingan dan konseling di luar bimbingan dan konseling. Koordinator bimbingan dan konseling merangkap tim tata tertib, tim PPKS (Program Penguasaan Kompetensi Siswa), dan tim pendalaman materi. Dua orang guru bimbingan dan konseling merangkap guru matapelajaran Bahasa Inggris dan Biologi, jika ada kegiatan insidentallainnya guru bimbingan dan konseling selalu terlibat.

Kondisi tersebut di atas membuat aktifitas guru bimbingan dan konseling di luar kegiatan bimbingan dan konseling sangat tinggi, akibatnya kegiatan koordinasi antar personil bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan dengan baik karena tidak bisa duduk bersama untuk koordinasi terkendala waktu. Selain itu, tidak bisa melakukan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dengan optimal. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan SK Menpan No. 84/1993 (Prayitno, 2001: 6) yang mengatakan bahwa tugas pokok guru bimbingan dan konseling adalah “menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 4).

Layanan bimbingan dan konseling MAN Medan dikelola oleh 6 guru bimbingan dan konseling dimana 4 orang guru memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, yaitu lulusan sarjana pendidikan bimbingan dan konseling. Sedangkan dua orang

guru bimbingan dan konseling berlatar belakang pendidikan bukan bimbingan dan konseling tetapi Bahasa Inggris dan Biologi. Hal ini tidak sejalan dengan asas keahlian yang dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 206)

Yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling menghendaki agar pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru bimbingan dan konseling harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun penegakan kode etik bimbingan dan konseling.

Kondisi di atas merupakan kendala dalam pengorganisasian bimbingan dan konseling. Beban tugas dan tanggung jawab personil bimbingan dan konseling diluar bimbingan dan konseling sangat banyak, dan hal tersebut mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan tugas pokok, sulit koordinasi, dan kurang komunikasi. Kendala lain, masih ada guru bimbingan dan konseling yang belum profesional di bidangnya, kurangnya kesadaran personil akan tugas, kurangnya dukungan.

C. Manajemen Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling sudah berjalan dengan adanya jam masuk di kelas XII yang berjumlah 19 lokal untuk melakukan layanan klasikal secara reguler satu jam pelajaran seminggu. Selain itu, terdapat beberapa layanan yang dilaksanakan secara insidental Pelaksanaan program fleksibel. Jenis layanan dasar yang dilakukan yaitu;

- a) Layanan dasar terdiri dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan & penyaluran, layanan penguasaan konten
- b) layanan responsif terdiri dari layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi,
- c) kegiatan pendukung terdiri dari aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, alih tangan kasus, kunjungan rumah, dan tampilan perpustakaan.

Jenis layanan yang dilakukan belum sesuai dengan yang dirumuskan oleh Depdiknas (2008: 228) layanan dasar terdiri dari:

- a) Layanan dasar terdiri dari bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data.
- b) Layanan responsif terdiri dari konseling individual & kelompok, referral, kolaborasi dengan guru mata pelajaran/wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah.
- c) Perencanaan individual.
- d) Dukungan sistem terdiri dari: pengembangan profesi, manajemen program, dan riset & pengembangan.

Beberapa layanan sudah dilaksanakan dengan baik seperti, layanan bimbingan kelas, layanan orientasi sudah, layanan informasi Layanan referral. Selain itu, kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua dan pihak terkait di luar sekolah sudah dilakukan dengan baik. Selain itu, layanan konferensi kasus, instrumentasi data, dan layanan home visit juga sudah dilaksanakan dengan baik. Layanan yang belum optimal dilakukan seperti layanan bimbingan kelompok. Meski layanan ini belum dilakukan dengan optimal sebagian materi

layanan bimbingan kelompok sudah disampaikan pada saat bimbingan kelas. Materi layanan seperti menyalurkan (bakat, minat & kegemaran), hidup sehat, dan etika pergaulan & solidaritas. Hanya saja metode penyampaian tidak sesuai yaitu dengan berkelompok. Seperti tertuang di Depdiknas (2008: 225) mengatakan konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil (5-10 orang). Bimbingan ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat peserta didik.

Layanan konseling individual dan konseling kelompok belum optimal. Kenyataannya layanan konseling individual siswa yang tercover tidak sampai 50% (wawancara dengan koordinator guru bimbingan dan konseling tanggal 29 april 2024). Kondisi ini merugikan siswa karena banyak siswa yang tidak terlayani. Layanan ini sangat dibutuhkan karena membantu siswa yang mengalami permasalahan. Layanan konseling individual ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya, Depdiknas (2008: 226). Layanan bimbingan teman sebaya belum optimal. Layanan bimbingan teman sebaya yang dilakukan adalah Foranza (Forum Anti Napza). Pelaksanaan dari sisi bimbingan dan konseling belum bisa di laksanakan maksimal.

Pada program tidak terdapat layanan perencanaan individual tetapi layanan penempatan dan penyaluran. Sebagian materi perencanaan individual ada pada layanan penempatan dan penyaluran seperti materi penempatan di kelas, ekstra- kurikuler, dan penjurusan. Sebagian materi terdapat pada layanan penguasaan konten, seperti mengambil mengambil keputusan melalui analisis SWOT dan ESQ mendasari perencanaan masa depan. Materi lain juga terdapat pada layanan informasi yaitu perencanaan karir dan analisis potensi diri. Dapat disimpulkan bahwa layanan perencanaan sudah dilakukan hanya saja materinya tersebar di beberapa jenis layanan.

Kesempatan bagi guru bimbingan dan konseling mengembangkan profesi ada namun belum semua melakukannya. Bentuk pengembangan profesi seperti kegiatan penataran, seminar, pelatihan, kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya sebagian kecil dapat dilakukan. Manajemen program bimbingan dan konseling sudah ada pembagian kerja dan ada program. Namun, mengelola bimbingan dan konseling seperti perencanaan, menganalisis, mengevaluasi secara detail belum dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, pelaksanaan program berbeda dengan perencanaan.

Hambatan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah kurangnya kerjasama, kurangnya kesadaran personil bimbingan dan konseling, kurangnya dukungan sistem, kurangnya pemahaman stakeholder akan tugas guru bimbingan dan konseling. Selain itu, banyaknya tugas guru bimbingan dan konseling diluar tugas pokok guru bimbingan dan konseling. Kondisi tersebut mengakibatkan personil bimbingan dan konseling sulit koordinasi, guru bimbingan dan konseling tidak bisa mengerjakan administrasi, dan tugas pokok menjadi terbengkalai. Hal ini dapat terlihat dari beberapa layanan yang tidak dilakukan dengan optimal dan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Cara mengatasi hambatan dengan meningkatkan kerjasama sesama personil bimbingan dan konseling dan menyesuaikan kondisi.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa salah satu MAN di Medan belum melakukan bimbingan dan konseling komprehensif.

Pengawasan bimbingan dan konseling belum optimal, seharusnya dilakukan pengawasan secara berkala karena pengawasan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana layanan terlaksana sesuai rencana. Pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas bimbingan dan konseling seperti yang dikemukakan Prayitno, (2001: 2) bahwa pengawasan dari luar yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap guru pembimbing diharapkan dapat menolong dan mengangkat guru-guru tersebut untuk setiap hari meningkatkan wawasan dan kemampuan fungsional, professional keahliannya, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya tertuang pada SK Mendikbud No.020/U/1998 (Prayitno, 2001: 18) yang mengemukakan bahwa pengawas sekolah bimbingan dan konseling adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan.

Kesimpulan

Penyusunan perencanaan bimbingan dan konseling berdasarkan studi kelayakan. Menyusun program bimbingan dan konseling belum dilakukan kerjasama dengan stakeholder sekolah. Perencanaan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan visi dan misi sekolah serta terpadu dengan kegiatan sekolah, namun belum berdasarkan harapan sekolah dan orang tua. Perencanaan personil belum sesuai standarkarena masih ada guru bimbingan dan konseling bukan sarjana bimbingan dan konseling. Perencanaan sarana dan prasarana belum memenuhi syarat karena belum memadai.

Pembagian tugas personil bimbingan dan konseling belum sesuai mekanisme yaitu minimal mengampu 150 siswa, tetapi rasio antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik belum seimbang. Total siswa 1910 orang diampu oleh empat guru bimbingan dan konseling dan dua orang guru bimbingan dan konseling sekaligus guru matapelajaran. Guru bimbingan dan Konseling mengampu dua kali lipat siswa dari jumlah minimal yang ditentukan. Berdasarkan jumlah siswa seyogyanya harus diampu oleh 12 orang guru bimbingan dan konseling, tetapi saat ini hanya ada 6 orang guru bimbingan dan konseling 2 diantaranya juga merangkap guru mata pelajaran. dan belum ada staf yang membantu administrasi bimbingan dan konseling. Kendala dalam pengorganisasian adalah rasio guru bimbingan dan konseling dan peserta didik belum seimbang, masih ada guru bimbingan dan konseling bukan sarjana bimbingan dan konseling, tugas-tugas guru bimbingan dan konseling di luar bimbingan dan konseling banyak, kurangnya kesadaran personil akan tugasnya, kurangnya dukungan, dan sulit koordinasi.

Pelaksanaan sudah berjalan namun belum menggunakan model bimbingan dan konseling komprehensif. Ada layanan klasikal yang dilakukan secara regular yaitu satu jam pelajaran per kelas per minggu. Layanan yang sudah dilakukan adalah layanan bimbingan kelas, layanan orientasi, layanan informasi. Kolaborasi dengan pihak sekolah dan dengan pihak terkait di luar sekolah. Layanan yang belum dilakukan dengan optimal adalah layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individual, dan layanan teman sebaya. Kegiatan pendukung yang dilakukan adalah layanan aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, home visit, referral, dan tampilan kepustakaan.

Pengawasan dilakukan namun belum optimal. Pengawasan dilakukan secara informal dengan pola monitoring. Pengawasan dilakukan oleh pengawas bidang bimbingan dan konseling yang tugasnya mengawasi bimbingan dan konseling MAN.

Referensi

- Ali, M. dkk. (2007). Ilmu dan aplikasi pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.
- Creswell, John W. (2014) *Research Design Qualitative, Kuantitative and mixed methods approaches*. Inc
- Depdiknas. Permendiknas Nomor 27, Tahun 2008, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Permendiknas Nomor 39, tahun 2009, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- . (2008). *Penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal*. Jakarta; BP. Cipta Jaya.
- Griffin, R.W. (1990). *Management*. Houghton: Mifflin Company.
- Gysbers, N.C. & P. Henderson. (2012). *Developing and managing your school guidance and counseling program (5th)*. Alexandria, VA: ACA.
- Hackney, H & Nye, S. (1973). *Counseling strategies and objectives*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Jones, A.J. (1970). *Principles of guidance*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Katrina, C. (2008). *An evaluation of school counselor supervision*. Dissertation. University of Texas at San Antonio. Proquest: Texas. Diambil tanggal 28 Mei 2013 dari <http://search.proquest.com/docview/304830706/13D95BC423F2E13C112/33?accountid=31324>.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis*. London: Sage Publications.
- Muro, J.J. & Dinkmeyer, D.C. (1977). *Counseling in the elementary and middle schools. A pragmatic approach*. USA: Wm. C. Brown Company Publisher.
- Nurihsan, A.J. & Sudianto, A. (2005). *Manajemen bimbingan dan konseling di SMA: kurikulum 2004*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Prayitno. (2001). *Panduan kegiatan pengawasan bimbingan dan konseling di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 74, tahun 2008, tentang Guru.
- Rue, L.W. & Byars, L.L. (2000). *Management, skill and application*. New York: Mc Graw Hill Companies. Inc.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sudaryono. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Depok: Rajawali Press.
- Sukardi, D.K. & Kusmawati, D.P.E.N. (2008). *Proses bimbingan dan konseling di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, N.S. (2007). *Bimbingan dan konseling dalam praktek mengembangkan potensi dan kepribadian siswa*. Jakarta: Maestro.
- Terry, G.R. (1977). *Principles of management*. (3rd) Homewood IL: Richard D Irwin, INC.
- Usman, H. (2011). *Manajemen: teori, praktik, dan riset pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, RK (2014) *Penelitian studi kasus; Desain dan metode (edisi ke-5)*. Sage
- Yusuf, S & Nurihsan, J. (2005). *Landasan bimbingan dan konseling*. Bandung: Rosdakarya